BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi terutama globalisasi ekonomi telah menimbulkan persaingan ekonomi yang ketat. Persaingan ini mengharuskan perusahaan untuk berpikir lebih kritis dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber dayanya yang berarti untuk menghadapi pesaing bisnisnya, perusahaan harus memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien.

Agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompleks, dibutuhkan pemeriksaan intern yang memadai, oleh karena itu manajemen membutuhkan bantuan dari fungsi pemeriksaan intern atau lebih dikenal dengan nama Audit Internal.

Saat ini keberadaan Audit Internal sudah merupakan suatu bagian penting dari perusahaan. Keberadaannya terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia bisnis yang membutuhkan penanganan profesional. Peran Audit Internal yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam suatu organisasi tentunya akan sangat membantu manajemen dalam menghadapi persaingan bisnis.

Pada prinsipnya Audit Internal merupakan pemeriksaan intern yang independen, yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan, telah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Untuk itu Audit Internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian, dan mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindak lanjuti. Salah satu temuan auditor internal diantaranya adalah penemuan kecurangan. Kecurangan terjadi antara lain disebabkan karena adanya tekanan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, kelemahan sistem dan prosedur serta adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut.

Biasanya kecurangan tidak mudah ditemukan. Kecurangan biasanya ditemukan karena kebetulan maupun karena sesuatu hal yang disengaja. Dengan demikian

manajemen harus berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan yang dikelolanya.

Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, Audit Internal diperlukan keberadaannya di dalam perusahaan, yang bertugas untuk mengevaluasi suatu sistem dan prosedur yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah diimplementasikan secara benar, melalui pengamatan, penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit organisasi.

Pada beberapa perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pengelolaan, pendistribusian, dan penyediaan jasa publik bagi masyarakat sebagai badan usaha, maka pengelolaan harus berdasarkan pengelolaan yang sehat, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Untuk dapat memenuhi fungsi ekonominya yaitu optimalisasi laba maka perusahaan harus menyadari perlunya manajemen yang baik.

Pemeriksaan intern yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern akan menghasilkan temuan-temuan, dan setiap temuan tersebut akan diberikan suatu rekomendasi dan saran-saran yang diperlukan, salah satu jenis pemeriksaan pada perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pengelolaan, pendistribusian, dan penyediaan jasa publik bagi masyarakat adalah kemungkinan adanya penyimpangan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Penulis melihat adanya permasalahan yang perlu dikaji, yaitu keterkaitan akan pemeriksaan intern, dengan sejumlah temuan yang kemungkinan atau dapat diidentifikasi sebagai temuan kecurangan (*fraud*) pada dunia perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pengelolaan, pendistribusian, dan penyediaan jasa publik bagi masyarakat, yang diterangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul :

"Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (*fraud*); Studi kasus pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan pada PT PLN (Persero)?
2. Apa hambatan yang timbul dalam menemukan kecurangan di PT PLN (Persero)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai peran profesi Audit Internal dalam pencegahan kecurangan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Audit Internal dalam pencegahan kecurangan, khususnya di PT PLN (Persero) dan hambatan yang terjadi dalam menemukan kecurangan di PT PLN (Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi :

1. Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah kecurangan yang terjadi di PT PLN (Persero) dan cara kerja Sistem Pengendalian Intern yang sesungguhnya.

2. Perusahaan

   Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang terkait, khususnya satuan kerja Audit Internal.

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, dan biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki pengalaman di bidangnya, yang terjadi karena adanya kesempatan serta adanya benturan kepentingan.

Menurut Wahyudi (2000:17)

"Jenis kecurangan dibagi dalam dua kelompok yaitu : kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan"

Kecurangan biasanya ditentukan melalui sistem pengawasan yang ditetapkan perusahaan, yang ditemukan secara kebetulan dalam pelaksanaan audit, maupun laporan dari pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan sangat membutuhkan Audit Internal yang handal untuk meneliti atau mengaudit seluruh aktivitas operasional di dalam perusahaan tersebut.

Adapun pengertian Audit Internal menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (1995)

"Internal Auditing is an independent appraisal functional established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization"

Definisi tersebut diartikan oleh Hiro Tugiman (1997:11) sebagai berikut :

"*Internal Audit* atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan"

Pada 12 Mei 2004, Standar Profesi Audit Internal (SPAI) mendefinisikan Audit Internal sebagai berikut :

"Audit Internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang *independent* dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengendalian risiko, pengendalian, dan proses *governance*"

Audit Internal mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai efektifitas suatu sistem pengendalian intern, dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan, sedang kebutuhan penyediaan informasinya tergantung pada kebutuhan dan permintaan manajemen.

Menurut Hartadi (1999) Sistem Pengendalian Intern dibutuhkan karena :

1. Luasnya ukuran dan kesatuan usaha yang menjadi begitu kompleks dan meluas, sehingga manajemen harus mempercayai berbagai macam laporan dan analisis, untuk mengendalikan operasi perusahaan.

2. Pengawasan dan penelaahan yang melihat pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik mampu melindungi perusahaan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan yang mungkin terjadi.

3. Tidak praktis apabila akuntan memeriksa secara keseluruhan dengan keterbatasan uang jasa tanpa mempercayai Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Tugas Audit Internal mencakup penilaian dan pemeriksaan terhadap kecukupan efektifitas SPI perusahaan dan mutu kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepadanya.

Untuk melaksanakan sebuah audit (pemeriksaan) diperlukan sumber daya yang memadai, yaitu :

1. Sistem informasi atau informasi yang dapat diakses dan diverifikasi kebenarannya. Verifikasi dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang menjadi pedoman untuk mengevaluasi informasi. Kriteria yang dimaksud

adalah kumpulan kebijakan, prosedur, dan pernyataan yang dipakai sebagai bahan rujukan.

2. Orang yang melakukan Audit Internal, haruslah orang yang kompeten, independen, dan dalam jumlah yang memadai.

Untuk mencapai pemeriksaan tersebut, maka pekerjaan pemeriksaan harus mencakup perencanaan, pemeriksaan, penelaahan, terhadap informasi, konfirmasi hasil telaahan, dan penyampaian hasil pemeriksaan, serta melakukan tindak lanjut terhadap berbagai hasil temuan termasuk kecurangan yang terjadi di perusahaan. Maka dari itu, Audit Internal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan informasi mengenai temuan tentang efektifnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan mutu operasionalitas kinerja perusahaan.

Informasi perlu disajikan secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat dibandingkan namun juga dapat disajikan dalam bentuk dan format yang berbeda atau kebutuhan pihak manajemen. Ciri-ciri informasi yang berkualitas, adalah informasi yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Akurat.
2. Lengkap.
3. Tepat waktu.
4. Relevan.
5. Obyektif.

Kualitas dan ketersediaan informasi perusahaan harus tetap dijaga agar efektifitas dan efisiensi kinerja perusahaan tetap terjaga. Apabila terjadi penyimpangan dan *fraud* maka auditor harus memberitahukan temuannya kepada manajemen disertai bukti-bukti terkait, rekomendasi atau saran untuk ditindaklanjuti penyempurnaannya dan selanjutnya dimonitori, apakah rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti atau belum.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka membuat rancangan hipotesis sebagai berikut :

"Adanya peran Audit Internal dalam pencegahan kecurangan pada organisasi"

Menurut peneliti terdahulu oleh :

Nama	:	Adimas Luhur T
NRP	:	01.03.058
Universitas	:	Widyatama
Perusahaan	:	Bank Indonesia, Jakarta Pusat
Judul	:	Peranan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (studi kasus pada Bank Indonesia, Jakarta Pusat)

Dari hasil penelitiannya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

"Terdapat peranan yang cukup signifikan dari Audit Internal dalam pencegahan kecurangan yang dapat dilihat daru hasil perhitungan kuesioner yang menunjukan hasil yang signifikan dan memadai. Berdasarkan hasil kuesioner juga menunjukan bahwa pencegahan kecurangan di Bank Indonesia, Jakarta Pusat sangat tinggi."

Perbedaannya :

1. Peneliti terdahulu melakukan studi kasus pada Bank Indonesia, Jakarta Pusat yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai jasa keuangan.
2. Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero), Bandung sebagai persahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan, pendistribusian, dan penyediaan jasa publik bagi masyarakat.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan metode studi kasus. Sumber data untuk menyusun skripsi ini, didapat dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian lapangan.
   a) Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab kepada responden pada bagian yang terlibat dalam bidang yang diteliti;
   b) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung sumber data yang dianalisis, kemudian diuraikan dalam data tertulis;

c) Kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui penyampaian daftar pertanyaan tertutup kepada responden pada bagian yang terlibat dalam bidang yang diteliti.

2. Penelitian kepustakaan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku dan referensi lainnya.

1.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) yang berlokasi di Jl. Cikapundung Barat No.2, Bandung. Sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2010 sampai dengan selesai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Pengertian peranan menurut Komarudin (1994) adalah sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam manajemen;
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai kasus;
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok dalam kelompok atau pranata;
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Definisi di atas dapat memberi petunjuk bahwa yang melakukan suatu peran adalah sesuatu yang nyata atau kongkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi peranan dalam penelitian ini dapat diartikan berfungsinya seseorang atau bagian di perusahaan. Sehingga demikian, peranan Audit Internal dalam menunjang efektifitas pengendalian intern di perusahaan dapat tercapai dengan didukung oleh fungsi peranan yang berjalan dengan semestinya.

2.2 Pengertian Audit

Pada dasarnya pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengendalian sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengertian pemeriksaan terdapat dua unsur yang selalu kita temui yaitu kondisi dan kriteria. Kondisi adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya melekat pada objek yang diperiksa. Kriteria adalah yang seharusnya dikerjakan atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Kriteria merupakan bahan pembanding sehingga dapat menetapkan apakah suatu kondisi menyimpang atau tidak.

Definisi mengenai audit yang dikemukakan oleh Arens et al (2008:4) adalah

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report an the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person"

Sedangkan menurut *American Accounting Association* yang dikutip oleh Barry E.Cushing dan Marshal B.Romney (1994)

"Auditing is a systematic process at objectively obtaining and evaluation evidence regarding assertion about economic action and events to as certain the degree of correspondence between those assertion and establish criteria and communication the result to interest users"

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa aspek dari pemeriksaan, yaitu :

1. Pemeriksaan merupakan suatu proses yang sistematis, artinya audit dilakukan secara bertahap dan memerlukan perencanaan yang cermat serta pemilihan teknis pemeriksaan yang memadai.
2. Untuk melaksanakan pemeriksaan, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan kriteria tertentu sebagai pedoman pengevaluasian informasi tersebut agar dapat di verifikasi.
3. Dalam setiap pemeriksaan tanggung jawab Auditor harus jelas, terutama mengenai penetapan entitas ekonomi dan periode waktu audit. Entitas ekonomi yang dimaksud seringkali satuan legal yang berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Persero, dan lain-lain.
4. Adanya bukti-bukti pemeriksaan yang merupakan informasi atau keterangan yang digunakan oleh Auditor dalam menilai atau menentukan tingkat kesesuaian informasi yang sedang diperiksa dengan kriteria yang ditetapkan. Auditor harus mengumpulkan bukti-bukti dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit.
5. Audit harus dilakukan oleh seorang Auditor yang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, seorang Auditor harus kompeten dan independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya.
6. Setiap pemeriksaan diakhiri dengan tahap pelaporan atau pengkomunikasian temuan-temuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk laporan berbeda-beda sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan tetapi pada

hakekatnya laporan harus mampu memberikan informasi mengenai kesesuaian informasi yang diperiksa dengan kriteria yang ditetapkan.

2.3 Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens et al (2008:16-19) ada tiga jenis Audit, yaitu :

1. *Financial Statement Audits*

   Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dengan tujuan memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan kriteria yang berlaku atau tertentu.

2. *Operational Audits*

   Pemeriksaan operasional adalah suatu tinjauan terhadap setiap bagian dan prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas kegiatan entitas tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional biasanya diajukan saran-saran rekomendasi pada manajemen untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan.

3. *Compliance Audits*

   Pemeriksaan ketaatan merupakan proses pemeriksaan atas ketaatan pelaksanaan suatu prosedur atau peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, baik pihak atasan perusahaan maupun pemerintah.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan tercapai, pengendalian intern secara terus menerus memerlukan pengawasan dari manajemen untuk menentukan apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, fungsi pengawasan ini kurang dapat dilaksanakan dengan baik, karena jangkauan dan ruang lingkup yang akan dikendalikan semakin luas dan kompleks sehingga kemampuan manajemen dirasakan sangat terbatas. Untuk itu manajemen memerlukan bagian khusus dalam perusahaan untuk melakukan penilaian atas pengendalian intern dan aktivitas-aktivitas perusahaan. Bagian ini disebut sebagai Audit Internal. Audit Internal harus dilakukan oleh seorang yang bebas dari pengaruh departemen atau bagian-bagian lain yang diperiksanya.

Audit Internal harus memahami segala pandangan dan tujuan manajemen, dalam waktu yang bersamaan dia juga harus memiliki sikap yang independen dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan sikap yang independen, Audit Internal diharapkan dapat memberikan rekomendasi, saran dan penilaian yang akan berguna bagi manajemen dan direksi untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengendalian intern perusahaan.

2.4 Audit Internal

2.4.1 Pengertian Audit Internal

Pengertian Audit Internal yang didefinisikan *The Institute of Internal Auditors* dalam *Standards for The Proffessionals Practice of Internal Auditing* yang dikutip oleh Ratliff dan Wallane (1996) dan Moeller dan Witt (1999) sebagai berikut

> *"Internal Auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization"*

Pengertian tersebut menyatakan bahwa Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitasnya sebagai suatu pelayanan terhadap organisasi.

Pada tahun 1997, Hiro Tugiman memberikan pengertian mengenai Audit Internal sebagai berikut

> "*Internal Auditing* atau Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan organisasi"

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (1999), *Internal Auditing* didefinisikan sebagai berikut

> *"Internal Auditing is an independent and objective assurance and consulting activity that guided by a philosophy of adding value to improve the operations of the organization. It assists an organization in accomplishing its objectives by bringing a systematic and disiplined*

approach to evaluate improve the effectiveness of organization's risk management, control and governing processes"

Audit Internal menurut pengertian di atas adalah suatu aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit Internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaannya.

Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Audit Internal adalah :

1. Suatu aktivitas independen objektif

   Definisi terdahulu menggambarkan Audit Internal sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi, sedangkan definisi baru mengakui profesi yang lebih fleksibel dan meninggalkan konsep independensi yang didefinisikan secara sempit.

2. Aktivitas pemberian jaminan dan konsultasi

   Fungsi penilaian tidak lagi menjadi jasa yang diberikan oleh Audit Internal dan tidak mengantisipasi peran Auditor yang meningkat dan pengaruhnya yang makin berkembang dalam organisasi. Konsep aktivitas pemberian jaminan dan konsultasi memfokuskan pada para pengguna jasa, bila profesi Auditor Internal tidak dapat memenuhi kebutuhan pada para pengguna, mereka akan memperolehnya dari pihak luar perusahaan.

3. Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi

   Konsep ini menempatkan Audit Internal ke inti organisasi. Perubahan filosofi ini sepenuhnya dapat diterima oleh semua Auditor. Sebagian Auditor merasa bahwa istilah "memberi nilai tambah" akan menjadi usang dan sebagian orang merasa bahwa Auditor Internal hanya bertanggung jawab pada Komite Audit.

   Bukti yang ada menunjukan sebagian besar Auditor memberikan nilai tambah bagi organisasi sebab hasil aktivitas tersebut menginformasikan kepada manajemen tentang efektivitas struktur pengendalian yang dimilikinya.

Manajemen menghendaki agar semua orang dalam organisasi dapat memberikan nilai tambah.

4. Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya

   Definisi baru berusaha mengkaitkan Audit Internal dengan faktor penting dan proses inti dengan menempatkan aktivitas Audit Internal sebagai suatu usaha untuk organisasi dalam mencapai tujuannya.

5. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan organisasi.

2.4.2 Unsur-Unsur Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2005), tiga unsur dalam Audit Internal yaitu :

1. Memastikan/memferifikasi (*Verification*)

   Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data dan informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah diverifikasi dapat ditentukan oleh Audit Internal tertentu apakah terdapat kekurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-saran perbaikan.

2. Menilai/mengevaluasi (*Evaluation*)

   Merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian akuntansi keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan.

3. Rekomendasi (*Recommendation*)

   Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif kepada manajemen), sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Audit Internal,

yaitu memastikan/memverifikasi (*verification*), menilai, mengevaluasi (*evaluation*) dan rekomendasi (*recommendation*).

2.4.3 Independensi

Independensi merupakan sikap tidak memihak, bebas dari benturan kepentingan dan obyektif dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Independensi dalam audit artinya sikap tidak memihak dan/atau menolak segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas auditnya.

Menurut Mulyadi (2006:26-27), independensi adalah

"Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, dapat diartikan sebagai adanya kejujuran dalam diri Auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri Auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya"

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan berbagai kegiatan audit, dibutuhkan independensi karena adanya harapan untuk mendapatkan suatu pertimbangan yang tidak memihak.

Kondisi yang penting dalam menjaga sikap independen, yaitu :

1. Status organisasi

   Menurut Hiro Tugiman dalam Standar Profesional Audit Internal (SPAI) (1997:20) mengemukakan bahwa:

   "Status organisasi unit Audit Internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab audit yang diberikan"

   Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pimpinan Audit Internal harus memberikan kebebasan terhadap individu yang memiliki kewenangan. Namun demikian, kewenangan tersebut sesuai dengan ruang lingkup audit dan memberikan pertimbangan yang cukup serta tindakan yang

efektif atas temuan dan rekomendasinya berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.

2. Objektivitas

Objektivitas merupakan kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan oleh Auditor Internal dalam melakukan audit, dan Auditor Internal tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain.

Objektivitas Auditor Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8) adalah sebagai berikut:

"Auditor Internal harus memiliki sikap mental yang obyektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)"

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa objektivitas mengharuskan Auditor Internal melakukan audit sedemikian rupa sehingga kejujuran akan hasil audit mereka dapat diyakinkan dan bukan merupakan hasil kompromi yang dapat menimbulkan konflik di dalam perusahaan itu sendiri.

2.4.4 Tanggung Jawab dan Kewenangan Audit

Audit Internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas penyediaan informasi untuk menilai keefektifan Sistem Pengendalian Intern dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan.

Oleh karena itu, kepala bagian Audit Internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian Audit Internal. Hal ini sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) (2004:8) tentang Tujuan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Audit Internal

"Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi Audit Internal harus dinyatakan secara formal dalam *charter* Audit Internal, konsisten dengan

Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi"

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan dan taggung jawab Audit internal didalam organisasi perusahaan harus dinyatakan secara jelas dalam dokumen tertulis yang formal dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dokumen tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian Audit Internal khususnya ruang lingkup audit. Namun demikian, bagian Audit Internal tidak memiliki tanggung jawab atau kewenangan terhadap aktivitas yang diauditnya.

2.4.5 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Tujuan Audit Internal yang terdapat dalam *Standards for The Profesional Practice of Internal Auditing* yang dikutip oleh Ratliff dan Wallace (1996) adalah

"*The objective of Internal Auditing is to assist members of the organization in the effective discharge of their responsibilities*"

Definisi di atas menyatakan bahwa tujuan Audit Internal adalah untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Hiro Tugiman (1997) memberikan pernyataan yang sama mengenai tujuan Audit Internal, yaitu

"Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif"

Untuk hal tersebut, Audit Internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa.

Pada tahun 1995, *The Institute of Internal Auditors* memberikan pernyataan tentang ruang lingkup Audit Internal yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2001) sebagai berikut:

"*The scope of Internal Auditing should encopass the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization's system of internal control and the quality of performance in carrying out assigned responsibilities*"

Menurut IIA, ruang lingkup Audit Intenal harus meliputi pengujian dan pengevaluasian terhadap kecukupan serta efektifitas Sistem Pengendalian Intern yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

Berdasarkan pernyataan IIA tersebut, Hiro Tugiman (1997) berpendapat bahwa ruang lingkup Audit Internal meliputi penilaian terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

Auditor Internal harus melaksanakan hal-hal berikut:

1. Me-*review* keandalan (reabilitas dan intergritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Me-*review* berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Me-*review* berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Me-*review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten sesuai dengan yang direncanakan.

Perencanaan lain mengenai ruang lingkup pekerjaan Audit Internal dikemukakan dalam kodifikasi *Standards for The Profesional Practice of Internal Auditing* (2000) yang dikutip oleh Boynton, Johnson dan Kell (2001) yaitu bahwa ruang lingkup Audit Internal harus meliputi pengujian dan penilaian yang memadai dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern organisasi dan kualitas kinerja pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

1. *Reliability and integrity of information*

Auditor Internal harus meninjau keandalan dan integritas informasi keuangan dan kegiatan operasi serta alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menggolongkan berbagai informasi tersebut.

2. *Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulation and contracts*

Auditor Internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan perjanjian yang mungkin berdampak jelas terhadap kegiatan serta laporan dan menentukan apakah organisasi mematuhinya.

3. *Safeguarding of assets*

Auditor Internal harus meninjau alat yang melindungi asset dan membuktikan keberadaannya.

4. *Economical and efficient use of resources*

Auditor Internal harus keekonomisan dan efektivitas penggunaan sumber daya.

5. *Accomplishment of established objectives and goals for operations or programs*

Auditor Internal harus meninjau kegiatan operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan operasi atau program dilaksanakan sesuai dengan telah direncanakan.

2.4.6 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi Auditor Internal menurut Hiro Tugiman (1997:11) adalah

"Fungsi *Internal Auditing* atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif"

Sedangkan menurut Chambers (1981:13), Internal Auditor pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama dalam perusahaan, yaitu:

"(1) *he act an arms of managements; (2) he round out and perfect the system of internal control; (3) he directly participant in the verification of financial statement*"

Tanggung jawab seorang Audit Internal menurut Komite SPAP Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2001:322) yaitu

"Auditor Internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut Auditor Internal mempertahankan obyektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya"

Fungsi dan tanggung jawab Auditor Internal akan berjalan dengan baik apabila pelaksanaan Audit Internal didukung oleh Audit Internal yang berkualitas dan profesional. Hiro Tugiman menyatakan bahwa:

"Keberhasilan pelaksanaan fungsi Audit Internal ditentukan oleh status yang diberikan perusahaan atau departemen Audit Internal juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan dari Audit Internal itu sendiri, karena suatu fungsi pemeriksaan tidak akan berhasil tanpa adanya orang yang berintelegensi tinggi, berdaya imajinasi, daya analisis kuat, berinisiatif serta berkemampuan untuk mengkomunikasikan perkembangan perusahaan dengan orang lain"

Tanggung jawab Audit Internal menurut Hartadi (1999:197) adalah sebagai berikut:

"Siapapun yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan suatu tugas, harus siap untuk menunjukkan seberapa baik atau buruknya dia telah melaksanakan tugas tersebut"

Tujuan akhir dan tanggung jawab Audit Internal adalah untuk melindungi harta perusahaan, menjamin bahwa laporan keuangan dan non keuangannya dapat

dipercaya, ditaatinya kebijakan dan prosedur serta menjamin apakah aktivitas di perusahaan sudah berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu ruang lingkup dan tanggung jawab dari Audit Internal tidak boleh dibatasi pada akuntansi dan keuangan saja, namun harus mencakup segala aspek perusahaan.

2.4.7 Kemampuan Profesional

Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian Audit Internal dan Auditor Internal.

Menurut Hiro Tugiman dalam Standar Profesional Audit Internal (SPAI) (1997:27-29) kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh bagian Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Personalia

   Satuan kerja Audit Internal harus memberikan jaminan atas kepastian bahwa teknis dan pendidikan para Auditor Internal, telah sesuai bagi audit yang akan dilaksanakan

   Menurut Handoko (2003:24) personalia adalah

   "Penyusunan personalia adalah penarikan (*recruitment*), latihan, dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif"

   Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengisian jabatan di bagian Audit Internal, dibutuhkan personalia yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pengalaman, serta berbagai persyaratan lainnya. Karena itu pimpinan satuan kerja Audit Internal harus mengetahui kemampuan dan keahlian, serta pengalaman setiap anggota dan calon Audit Internalnya.

2. Pengetahuan dan kecakapan

   Staff Auditor Internal harus memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan audit dalam organisasi perusahaan. Misalnya, kemampuan dalam menerapkan standar audit, prosedur dan teknik-teknik audit.

   Dengan demikian, bagian Audit Internal sebaiknya memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.

3. Pengawasan

Melakukan pengawasan adalah tanggung jawab dari satuan kerja Audit Internal. Pengawasan merupakan proses yang berkelanjutan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan diakhiri dengan penyusunan laporan hasil audit dan kesimpulan audit.

Menurut Handoko (2003:25)

"Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan"

Sedangkan menurut SPAI (2004:59-61) menyatakan bahwa:

a. Auditor Internal harus memiliki pengetahuan, keahlian dan kompetisi lainnya, seperti :
    a. Keahlian untuk mempraktikkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), prosedur, dan teknik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.
    b. Keahlian didalam prinsip dan teknik akuntansi diperlukan bagi para Auditor yang bekerja secara ekstensif dengan catatan-catatan dan laporan keuangan.
    c. Pemahaman prinsip-prinsip manajemen sangat dibutuhkan untuk mengenali dan mengevaluasi materialitas dan signifikansi dari penyimpangan terhadap praktik bisnis yang hebat.
b. Auditor Internal harus mempunyai ketrampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
c. Auditor Internal harus memiliki ketrampilan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan berbagai permasalahan seperti tujuan penugasan, hubungan yang memuaskan dengan klien.
d. Penanggung jawab fungsi Audit Internal harus menetapkan kriteria yang cocok mengenai pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan

untuk mengisi posisi Auditor Internal, dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, dan tingkat tanggung jawabnya.

e. Staff Auditor Internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mempraktikan profesi dalam organisasinya.

f. Pengembangan profesi berkelanjutan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa staff Auditor Internal senantiasa memiliki keahlian yang memadai.

g. Penanggung jawab fungsi Audit Internal perlu mendapatkan bantuan dari tenaga ahli/*expert* dari luar fungsi Audit Internal untuk mendukung atau melengkapi fungsi Audit Internal.

2.4.8 Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan berguna untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti. Hiro Tugiman (2003:56) mengemukakan bahwa:

> "Survei merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi, tanpa melakukan verifikasi secara terperinci, tentang kegiatan yang akan diaudit"

Dari pengerian di atas, dapat diketahui bahwa survei merupakan proses pengumpulan data atau informasi untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kegiatan yang akan diaudit. Survei pendahuluan ini bertujuan memahami kegiatan yang ditinjau dan mengumpulkan fakta-fakta untuk menyususn rencana audit sehingga dapat bekerja sama dengan *auditee*.

Menurut Ratliff et al (1996:312-316) survei pendahuluan terdiri dari:

1. *The opening Conference*
2. *On-site tour*
3. *Study of Document*
4. *Writen Description of the Auditee*
5. *Analytical Procedures*

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa survei pendahuluan harus dilakukan untuk mengetahui kegiatan objek yang diteliti dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. *The Opening Conference* (Pertemuan Pendahuluan)

The Opening Conference (Pertemuan Pendahuluan) dilakukan antara anggota tim Audit Internal dengan manajemen perusahaan. Pertemuan ini biasanya diselenggarakan di tempat kerja *auditee*.

2. *On-site Tour* (Peninjauan Lokasi)

   On-site tour merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meninjau lokasi atau tempat dilakukan audit. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran luas mengenai operasional perusahaan. Namun demikian, Auditor Internal harus mengamati aktivitas operasional yang tidak biasa atau indikasi penyalahgunaan fasilitas serta melihat sikap karyawan terhadap pekerjaannya.

   Dalam hal ini, Auditor Internal dapat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh informasi secara jelas dan efektif. Untuk memastikan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi yang efektif, Yayasan Pendidikan Internal Audit (2003:16) mengemukakan bahwa:

   "Salah satu bentuk komunikasi Auditor dengan *auditee* adalah melalui wawancara. Teknik wawancara yang efektif akan menciptakan komunikasi yang baik antara Auditor dengan *auditee*"

   Dengan demikian, jelas bahwa wawancara merupakan alat komunikasi yang sangat efektif dilakukan antara Auditor dengan objek yang diaudit. Sehingga Auditor memperoleh informasi dengan cepat karena terciptanya hubungan yang baik antara kedua belah pihak.

3. *Study of Documents* (Mempelajari Dokumen)

   Study of Documents (mempelajari dokumen) yang dipilih memberikan dasar untuk deskripsi tertulis dari kegiatan audit yang tercakup dalam file audit. Dokumen yang diperiksa oleh Auditor adalah dokumen yang digunakan klien dalam menyediakan informasi untuk menuntun bisnis dalam suatu organisasi. Auditor Internal akan mempelajari dokumen tentang grafik organisasi, pernyataan tujuan organisasi, gambaran kerja, dokumen kegiatan lain serta laporan-laporan yang relevan. Kunci dari

kegiatan ini adalah Auditor Internal dapat mengetahui bagaimana dokumen dibuat, bagaimana cara menyimpannya dan bagaimana cara pengamanannya.

4. *Written Description of The Auditee* (Deskripsi Tertulis dari *Auditee*)

   Auditor Internal harus mengerti tentang kegiatan *auditee* dalam hal mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern yang memadai. *Written Description of the auditee* disimpan dalam file permanen yang dapat dimengerti dan memberikan referensi untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern dan prosedur audit. Deskripsi dari sistem informasi dan kegiatan mencakup *flow chart,* struktur organisasi, informasi finansial dan operasi perusahaan.

5. *Analytical Procedures* (Prosedur Analisis)

   Analytical Procedures (prosedur analitis) memberikan analisis laporan singkat dari rangkuman data kuantitatif yang mencakup laporan keuangan dan laporan kegiatan lainnya. Saat pelaksanaan tinjauan prosedur analitis, Auditor Internal membandingkan hasil nyata untuk aktivitas audit dari tahun ke tahun, contohnya membandingkan hasil operasi dengan anggaran.

2.4.9 Pelaksanaan Kegiatan Audit

Auditor Internal harus melaksanakan kegiatan audit untuk memperoleh berbagai informasi yang mendukung kegiatan audit. Pelaksanaan kegiatan audit menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) (2004:23-24) adalah sebagai berikut:

> "Dalam melaksanakan audit, Auditor Internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan"

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa dalam dalam melaksanakan kegiatan audit seorang Auditor Internal harus dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mendokumentasikan informasi yang tepat untuk

memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf.

Hiro Tugiman (2003:53-78) menyatakan bahwa tahap-tahap pelaksanaan kegiatan audit adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan audit
2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
3. Penyampaian Hasil Audit
4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari pengawas. Apabila rencana audit sudah disetujui, maka Auditor Internal melakukan pengujian dan pengevaluasian informasi. Informasi yang diperoleh dalam melakukan audit tersebut harus dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Berikut ini akan dijelaskan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan audit.

1. Perencanaan Audit

   Auditor Internal harus merencanakan terlebih dahulu setiap tugas audit yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari perencanaan audit adalah agar audit yang dilakukan terarah dan tepat sasaran. Dalam buku yang sama, Hiro Tugiman (2003:53-59) menyatakan bahwa perencanaan Audit Internal harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal berikut:

   1. Penetapan tujuan audit dan lingkup audit
   2. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diaudit
   3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit
   4. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu
   5. Melaksanakan survei
   6. Penulisan program audit
   7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan disampaikan
   8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit

   Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam perencanaan audit, Auditor Internal harus menentukan tujuan audit dengan menjelaskan berbagai hal yang akan dicapai dalam pelaksanaan audit serta menyatakan lingkup pekerjaan Audit Internal. Sehubungan dengan itu, Auditor

Internal harus memperoleh informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diaudit. Misalnya, informasi anggaran, data keuangan dan kertas kerja audit sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan audit, dibutuhkan tim Audit Internal yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu.

Selanjutnya, tim Audit Internal mengadakan rapat dengan manajemen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan diaudit. Sebelum melakukan audit, tim audit internal harus melakukan survei lapangan untuk memperoleh informasi dan mengidentifikasi berbagai area penting yang memerlukan penekanan khusus. Dari survei yang dilakukan tersebut, Auditor Internal akan membuat program audit. Setelah program audit dibuat, Pimpinan Audit Internal harus menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil audit akan disampaikan serta menyetujui rencana kerja audit yang dilakukan.

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Setelah mendokumentasikan perencanaan audit, Auditor Internal harus mengumpulkan informasi, melakukan analisis, menginterpretasikan, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Masih dalam buku yang sama, Hiro Tugiman (2003:59-68) menyatakan bahwa proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

1. Mengumpukan informasi yang berhubungan dengan tujuan dan lingkup audit
2. Informasi harus mencukupi, kompeten, relevan
3. Penyeleksian terhadap prosedur audit
4. Melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi
5. Membuat kertas kerja audit

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam pengujian dan pengevaluasian informasi, Auditor Internal harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan lingkup audit. Informasi yang diperoleh harus cukup, kompeten, relevan dan berguna bagi penyediaan rekomendasi atas temuan audit.

Selanjutnya, Auditor Internal harus menyeleksi prosedur audit, termasuk teknik pengujian yang dipergunakan apakah praktis atau tidak, dan apakah perlu diubah bila keadaan menghendaki.

Auditor Internal harus melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi adalah untuk menjamin terpeliharanya objektivitas dan tercapainya sasaran audit. Sehubungan dengan itu, Auditor Internal akan membuat kertas kerja audit. Kertas kerja audit ini harus mencatat semua informasi yang diperoleh dan analisis-analisis yang dikemukakan haruslah mendukung temuan audit dan rekomendasi yang dilaporkan.

3. Penyampaian Hasil Audit

Setelah melakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, Auditor Internal harus menyampaikan laporan hasil audit yang dilakukannya. Masih dalam buku yang sama, Hiro Tugiman (2003:68-75) menyatakan bahwa Auditor Internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani
2. Mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan yang tepat
3. Laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu
4. Laporan mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan audit
5. Laporan mencantumkan rekomendasi bagi perkembangan yang akan dicapai
6. Mencantumkan pandangan dari pihak yang diaudit tentang kesimpulan atau rekomendasi
7. Pimpinan Audit Internal harus mereview dan menyetujui laporan audit akhir

Dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI), Hiro Tugiman (2004:103-104) menyatakan bahwa:

a. Penanggung jawab audit harus menyampaikan secara tahunan kepada Dewan Komisaris dan Manajemen Senior ikhtisar jadwal pekerjaan

fungsi Audit Internal, perencanaan staff, dan anggaran keuangan. Pertanggungjawaban fungsi Audit Internal juga harus menyerahkan seluruh perbuatan interim yang signifikan untuk dimintakan persetujuan dan informasinya. Jadwal pekerjaan penugasan, perencanaan staff, dan anggaran keuangan harus diberitahukan kepada Dewan Komisaris dan Manajemen Senior mengenai ruang lingkup pekerjaan audit, dan jika ada pembatasan atas ruang lingkup.

b. Jadwal pekerjaan audit yang telah disetujui, perencanaan staff, dan anggaran keuangan, serta perubahan-perubahan interim yang signifikan harus memuat informasi yang cukup untuk memungkinkan Dewan dapat memastikan apakah tujuan dan rencana fungsi Audit Internal mendukung organisasi dan Dewan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa setelah pengujian terhadap audit selesai dilakukan, Auditor Internal akan membuat laporan tertulis yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Dalam mengusulkan dan rekomendasi, Auditor Internal harus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan manajemen, yakni Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak tertentu. Laporan yang disampaikan harus obyektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. Sehubungan dengan itu, laporan yang disampaikan harus menyajikan tujuan, lingkup, dan hasil audit dan bila keadaan memungkinkan, laporan harus berisi tentang pendapat Auditor.

Rekomendasi atas perbaikan yang masih dapat dilakukan, pernyataan atas kepuasan atas prestasi yang dicapai, dan tindakan perbaikan dapat dicantumkan dalam laporan hasil audit. Selain itu, pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi, dapat pula dicantumkan dalam laporan hasil audit.

Selanjutnya, Pimpinan Audit Internal harus menelaah kembali dan menyetujui laporan audit akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.

4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Auditor Internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan tindakan perbaikan yang memadai telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam audit. Hal ini sesuai dengan Norma Audit yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2003:75) yang menyatakan bahwa:

"Pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat"

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar Audit mewajibkan Auditor Internal berusaha agar rekomendasinya dilaksanakan oleh pihak manajemen serta memantau tindak lanjut untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh manajemen.

2.5 Kecurangan (*Fraud*)

Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (*errors*) dan ketidakberesan (*irregulatiries*). *Errors* merupakan kesalahan yang timbul sebagai akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan, dan lain-lain. Sedangkan *irregulatiries* merupakan kesalahan yang disengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan (*fraud*).

Dalam istilah sehari-hari *fraud* dapat diartikan dengan istilah pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain.

2.5.1 Pengertian *Fraud*

Menurut Jack Bologna et al yang dikutip oleh Amin Widjaja (2000:1) definisi *fraud* adalah sebagai berikut

"Fraud is criminal deception intendento financially benefit the deceiver"

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (1997:32) kecurangan didefinisikan sebagai berikut

> "Kecurangan atau *fraud* meliputi suatu susunan ketidakberesan dan perbuatan ilegal yang merupakan suatu muslihat yang dilakukan untuk keuntungan atau kerugian organisasi, yang dilakukan oleh orang di luar atau di dalam organisasi"

Fraud dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan untuk menyembunyikan, menutupi atau tindakan tidak jujur lainnya, melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban.

Setidaknya *fraud* dapat melibatkan beberapa pihak, di antaranya:

1. Pihak Internal, yaitu pegawai maupun manajemen.
2. Pihak eksternal, yaitu *costumer* dan/atau pihak ketiga.
3. Kerjasama, yaitu *fraud* yang dilakukan secara kerjasama antara pihak eksternal dan internal.

2.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Tejadinya *Fraud*

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Suatu hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya kecurangan sebagai akibat tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungannya yang memungkinkan untuk bertindak. Soejono Karni (2000:38) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya pengendalian internal
   a. Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian intern
   b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan
   c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadi *conflict interest*
   d. Auditor Internal tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar.
2. Tekanan keuangan terhadap seseorang

a. Banyaknya utang
b. Pendapatan rendah
c. Gaya hidup mewah

3. Tekanan non finansial
   a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan
   b. Direktur utama menetapkan tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan dengan bawahannya.
   c. Penurunan penjualan
4. Indikasi lain
   a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai
   b. Meremehkan integritas pribadi
   c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal

Ciri-ciri atau kondisi adanya kecurangan menurut Soejono Karni (2000:43) adalah:

a. Terdapat angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya
b. Adanya perbedaan antara buku besar dengan buku pembantu
c. Perbedaan yang dikemukakan melalui konfirmasi
d. Transaksi yang dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen baik yang umum maupun yang khusus
e. Terdapat perbedaan kepentingan (*conflict interest*), pada tugas pekerjaan karyawan.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan, manajemen akan mengatur pegawainya dengan tindakan yang tidak benar. Hal ini disebabkan karena manajemen yang selalu melakukan tindakan korupsi, tidak efisien dan tidak cakap dalam me-*manage* perusahaan. Apabila pendapatan rendah atau banyak hutang, pegawai akan melakukan *fraud* karena masalah pribadi yang tidak dapat terpecahkan. Karena banyaknya *fraud* yang terjadi, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar sehingga perusahaan dapat jatuh pada saat yang tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau saham.

2.5.3 Tanda-Tanda *Fraud*

Fraud dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau pemeriksaan intern apabila jeli dalam melihat tanda-tanda *fraud* tersebut. Amin Widjaja Tunggal (1992:61-62) menyatakan bahwa beberapa tanda *fraud* antara lain:

1. Terdapatnya perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan
4. Pengendalian operasi yang tidak baik
5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa tanda-tanda *fraud* dapat diketahui dari perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan dimanipulasi utnuk menutupi *fraud* sehingga timbul perbedaan-perbedaan angka.

Tidak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada karyawan dapat menimbulkan *fraud* karena karyawan bertindak semena-mena tanpa memperdulikan tanggung jawabnya.

Fraud dapat dilakukan dengan mudah bila tidak dilakuakan rotasi pekerjaan sehingga karyawan mengetahui rahasia atau hal-hal penting yang berkaitan dengan pekerjaannya. Selain itu, pengendalian operasi yang tidak baik dapat membuat kegiatan yang dilakukan tidak berjalan lancar, contohnya adalah banyaknya sumber daya yang hilang sehingga kegiatan operasi menjadi tidak efisien. Hilangnya sumber daya tersebut karena situasi karyawan dalam keadaan tertekan karena frustasi atau merasa diperlakukan tidak adil.

2.5.4 Unsur-unsur *Fraud*

Suatu *fraud* terdiri dari unsur-unsur penting yang digunakan untuk menguji tanda-tanda fraud atau tidak. Mark R.Simmons (2003) menyatakan bahwa:

"Fraud occurs when all of the following elements exist:

1. *An individual or an organization intentionally makes an untrue representation about an important fact or event*

2. *The untrue representation is believed by the victim (the person or organization to whom the representation has been made)*
3. *The victim relies upon and acts upon the untrue representation*
4. *The victim suffers loss of money and/or property as a result of relying upon and acting upon the untrue representation".*

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fraud* terjadi apabila terdiri dari unsur-unsur berikut ini:

1. Adanya unsur kesenjangan dari individu atau organisasi untuk membuat penyajian yang keliru mengenai peristiwa atau fakta yang penting.
2. Adanya kepercayaan dari korban *fraud* terhadap penyajian yang keliru.
3. Adanya kepercayaan dari korban *fraud* untuk melaksanakan penyajian yang keliru tersebut.
5. Korban *fraud* menderita kehilangan hak milik atau uang karena telah mempercayai dan bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru tersebut.

2.5.5 Jenis dan Bentuk *Fraud*

Dalam artikel yang berjudul Komputer vs *Fraud* Audit, oleh Nanik Wahyuni disebutkan bahwa klasifikasi terjadinya *fraud* tergantung pada kreativitas pelaku *fraud*. Jenis *fraud* menurut Schulze dan Daviel L.Black yang dikutip oleh Nanik Wahyuni (2000:17-18) adalah sebagai berikut:

1. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)

   Manajemen mungkin akan terlibat dengan setiap macam *fraud*. *Management fraud* adalah suatu tindakan sengaja membuat laporan keuangan dengan memasukan jumlah angka yang palsu atau mengubah catatan akuntansi yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Misalnya manipulasi, mengubah catatan akuntansi atau dokumen yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

2. Kecurangan Karyawan (*Employee Fraud*)

Employee Fraud yang paling umum adalah pemalsuan daftar gaji (*false payroll*), penjual palsu (*false vendor*) dan transfer cek palsu (*check kitting*). Dalam hal ini, pemalsuan daftar gaji dilakukan dengan menciptakan karyawan palsu dan kemudian menguangkan gaji karyawan palsu tersebut. Pemalsuan penjual dilakukan dengan membentuk penjual palsu, faktur palsu yang digunakan untuk menerima pembayaran. Sedangkan cek palsu melibatkan pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yang lain dan mencatat secara tidak benar transfer tersebut.

Fraud dapat terjadi pada perusahaan yang menggunakan komputerisasi. Pada dasarnya *computer fraud* dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menyalahgunakan waktu komputer atau mencuri sumber daya komputer dan memanipulasi data atau memasukkan data yang tidak benar.

Computer fraud dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan oleh Dr. Russell Smith yang dikutip oleh Arif (2000:42) bahwa:

> "Kejahatan *fraud* melalui komputer cenderung meningkat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh KPMG, antara 1997 dan 1999 telah terjadi peningkatan sebesar 71% dari sebelumnya 12%. Hasil survei KPMG tahun 1999 juga menunjukkan total kerugian akibat kejahatan komputer lebih dari $16 juta"

Dengan demikian, jelaslah bahwa kejahatan *fraud* selalu mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 telah terjadi kenaikan sebesar 59% dan akibat tindakan ini perusahaan mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat besar.

Adapun bentuk-bentuk *fraud* menurut Amin Widjaja Tunggal (1992:30) *fraud* dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu:

1. *Fraud* yang merugikan perusahaan

Perusahaan merupakan korban *fraud* yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke bawah. Bentuk *fraud* dalam kategori ini misalnya pencurian harta perusahaan.

2. *Fraud* yang menguntungkan perusahaan

   Fraud ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Bentuk *fraud* dalam kategori ini misalnya pencatatan laba dan aktiva yang lebih besar, mencatat biaya-biaya lebih kecil, tidak mencatat retur penjualan, dan lain-lain.

2.6 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen. Pemeriksa intern perusahaan bertanggungjawab untuk menguji dan menilai kecukupan serta efektivitas tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, Audit Internal harus melakukan audit sesuai dengan prosedur, memonitor gejala-gejala *fraud*, melakukan penelusuran untuk mencegah *fraud*, dan mengidentifikasi semua *fraud* yang mungkin terjadi.

Arif dan Satyo (2000:42) menyatakan bahwa:

"*Fraud* jelas-jelas menimbulkan kerugian sangat besar bagi perusahaan atau organisasi. Untuk itu, perlu diambil tindakan agar terhindar atau paling tidak mengurangi aktivitas *fraud* tersebut"

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen harus mengambil keputusan atau kebijakan khusus untuk mencegah terjadinya *fraud* di dalam perusahaan. Misalnya penting bagi perusahaan memiliki kebijakan *Internal Control* untuk mengontrol *fraud*.

Karena *fraud* merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin, K. H. Spencer Pickett (2001:614-618) mengemukakan beberapa teknik pencegahan yang harus dilakukan adalah:

1. *Good recruitment procedures*
2. *Independent checks over work*
3. *Regular staff meetings*
4. *An employee code of conduct*

5. Good communication

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa beberapa teknik pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan prosedur yang tepat dalam perusahaan karena hal ini merupakan langkah awal untuk mencegah *fraud*. Prosedur yang tepat tidak berarti tanpa dukungan karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan audit yang independen terhadap karyawan. Untuk menciptakan hubungan yang baik antara manajemen dengan karyawannya, manajemen harus selalu mengadakan pertemuan atau rapat yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pendapat atau keluhan-keluhan yang dihadapi. Dari pertemuan yang telah dilakukan, tingkah laku masing-masing karyawan dapat diketahui sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

2.6.1 Syarat Penemuan *Fraud*

Agar *fraud* dapat ditemukan dan dideteksi, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern yang baik, agar setiap kecurangan dapat dideteksi lebih dini. Selain itu perlu dukungan secara penuh dari pihak manajemen, agar Audit Internal dapat bekerja secara efektif dan efisien dan menemukan kecurangan yang terjadi di perusahaan lebih dini. Pihak manajemen pun perlu mendelegasikan tugas dan memberikan dukungan penuh pada Audit Internal dan kepada seluruh jajaran operasional perusahaan.

Selain itu agar *fraud* dapat ditemukan, menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya "Pemeriksaan Kecurangan" (1992:71-73) menjelaskan bahwa

Syarat fraud dapat ditemukan, yaitu:

1. Penemuan *fraud*
2. Bukti-bukti yang cukup kompeten

Penjelasan:

1. Penemuan *fraud*

Audit Internal diharapkan dapat menemukan *fraud* yang terjadi di dalam perusahaan, sehingga *fraud* yang terjadi dapat segera diatasi. Temuan-temuan hasil audit harus didasarkan pada:

a. Kriteria, yaitu berbagai sumber, standar, ukuran, atau harapan dalam evaluasi;

b. Kondisi, yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh Auditor Internal;

c. Sebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sesungguhnya;

d. Akibat, yaitu berbagai kerugian yang timbul atau dihadapi oleh pihak-pihak yang di audit, karena terjadinya kondisi dimana situasi yang tidak sesuai dengan kriteria;

e. Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan berbagai rekomendasi hasil yang dicapai oleh pihak yang diaudit, dan informasi lain yang membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain.

Penemuan *fraud* dapat diketahui dari sistem pengawasan yang diterapkan. *Fraud* dapat ditemukan dari audit yang dilakukan, baik secara kebetulan maupun melalui pengendalian serta dari informasi pihak lain.

2. Bukti yang cukup kompeten

Bukti yang cukup faktual dan kompeten dapat sangat berguna karena dapat membuktikan, orang maupun pihak-pihak tertentu yang menerima atau memperoleh bukti yang kuat, akan mendukung pendapat Auditor. Bukti yang kompeten, dan faktual diperoleh dengan menggunakan teknik audit yang tepat.

2.6.2 Ruang Lingkup *Fraud Auditing*

Ruang lingkup *fraud auditing* merupakan pembatasan-pembatasan tertentu dalam melakukan audit. Menurut Amin Widjaja Tunggal (1992:77-80) ruang lingkup fraud auditing meliputi :

1. Tingkat materialitas
2. Biaya
3. Informasi yang sensitif
4. Pengembangan integritas

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *fraud auditing* harus ditentukan berdasarkan tingkat materialitas, biaya yang diperlukan,

informasi yang sensitif tentang fraud, dan pengembangan intergritas di dalam perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terdapat dalam ruang lingkup *fraud auditing*.

1. Tingkat Materialitas

   Suatu *fraud* tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari definisi ini adalah:

   a. *Fraud* menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah.
   b. Eksistensi *fraud* sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam pengendalian.
   c. *Fraud* secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya, manajemen melakukan pembayaran yang ilegal, perusahaan dan eksekutif yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas perusahaan.

   Materialitas dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007:6) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 30 berbunyi:

   "Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna"

   Oleh karena itu, tingkat materialitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan Audit Internal dalam menentukan jumlah bukti yang cukup. Informasi yang diperoleh dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat

informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Biaya

Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau menfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencegah *fraud* pada masa yang akan datang.Untuk menemukan dan mengungkapkan *fraud* diperlukan biaya yang sangat tinggi walaupun hasilnya tidak maksimal. Misalnya, jika terjadi *fraud* yang melibatkan persekongkolan beberapa karyawan yang menyangkut pemalsuan dokumen. Penipuan semacam itu cenderung tidak terungkap dalam audit yang normal.

3. Informasi yang sensitif

Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup *fraud*, segera membuat kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas *fraud*. Sifat sensitif dari aktivitas *fraud* atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya.

4. Pengembangan Integritas

Auditor Internal sering diminta untuk melakukan program peningkatan integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan. Sehubungan dengan itu, Hiro Tugiman (1999:26) menyatakan bahwa:

"Hal yang berjalan seiring dengan pengungkapan kecurangan adalah peningkatan integritas dalam organisasi"

Dari pernyataan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dengan peningkatan integritas dalam organisasi, *fraud* dengan mudah dapat diungkapkan karena adanya kejujuran dan sikap yang tegas dari karyawan.

Selain itu, keinginan untuk menghindari pengambilan alih manajemen, adalah topik yang mungkin perlu ditekankan pada program peningkatan integritas.

2.6.3 Pendekatan Audit

Pendekatan audit dilakukan agar Audit Internal dengan mudah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap informasi yang diperoleh. Menurut Amin Widjaja Tunggal (1992:81-84) pendekatan audit terdiri dari:

1. Analisa ancaman
2. Survei pendahuluan
3. Audit program
4. Pemilihan tim audit

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan audit dapat dilakukan dengan analisis ancaman, survei pendahuluan, membuat program audit, dan memilih tim untuk mengumpulkan informasi. Berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan audit:

1. Analisis Ancaman

   Dalam pendekatan *fraud auditing*, anasisis ancaman seperti analisis dari pengungkapan *fraud* harus dilakukan. Analisis ancaman dapat membantu mengarahkan rencana audit, misalnya melakukan pengawasan pada aktiva untuk mengetahui kemungkinan terjadinya *fraud*.

   Menurut Hiro Tugiman (1999:26) menyatakan bahwa

   "Dalam analisis ancaman, peninjauan dan evaluasi kendali adalah cara utama mengevaluasi kemungkinan terjadinya ketidakberesan"

   Dari pernyataan di atas, jelas bahwa analisis ancaman merupakan cara yang paling tepat digunakan untuk mengevaluasi terjadinya ketidakberesan atau *fraud* di dalam perusahaan.

2. Survei Pendahuluan

   Tahap pokok dari survei ini adalah melakukan analisis ancaman (*threat analysis*). Hal ini dilakukan sehubungan dengan penilaian sebagai dasar

untuk memformulasikan program audit. Tentunya akan sangat membantu jika masalah yang timbul dalam fase ini dapat dikenali.

Menurut Ratliff et al (1996:312), manfaat survey pendahuluan adalah *"Preliminary survey give auditors the opportunity to get some initial on-site information which can be extremely valuable in becoming familiar with current operations of the auditee and the controls to be audited"*

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan survei pendahuluan, Auditor akan memperoleh informasi mengenai latar belakang perusahaan atau hal yang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan audit.

3. Audit Program

Audit Internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Menurut Wuryan Andayani (2008:94), program Audit Internal merupakan pedoman dan salah satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah ini dirancang untuk:

a. Mengumpulkan bahan bukti; dan
b. Memungkinkan Auditor Internal untuk mengemukakan pendapat mengenai efisiensi dan efektifitas aktivitas yang diperiksanya.

Menurut Wuryan Andayani (2008), dalam buku yang sama mengemukakan bahwa program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan kepada *supervisor audit* maupun kepada staff audit.
b. Menjadi dasar penugasan Auditor.
c. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang dianggarkan.

d. Memungkinkan *supervisor audit* dan manajer membandingkan apa yang telah dikerjakan dan apa yang direncakan.

e. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit.

f. Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan.

g. Membantu Auditor para audit selanjutnya, untuk mengenal lebih dekat jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan.

h. Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan.

i. Menjadi titik awal bagi penilai fungsi Audit Internal untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan.

4. Pemilihan Tim Audit

Tim audit harus mengumpulkan informasi mengenai catatan-catatan yang tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian, atau mengubah bukti secara sengaja dalam melaksanakan audit kecurangan. Dalam hal ini tenaga ahli diperlukan untuk melakukan proses audit yang lebih rumit.

Untuk memperoleh informasi khususnya yang berhubungan dengan *fraud*, tim auditor akan melakukan wawancara dengan banyak karyawan termasuk mereka yang dicurigai.

Sehubungan dengan itu, anggota (*fraud auditor*) tim audit harus memiliki ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam mewawancarai untuk mendokumentasikan hasil diskusi.

Pertimbangan dalam penugasan staf adalah bahwa *fraud auditing* tidak dapat diperkirakan sebelumnya, karena mereka ditemukan dan dibutuhkan tindak lanjut secepatnya. Pertimbangan juga perlu diberikan kepada orang lain yang sering menjadi bagian dari tim *fraud auditing* yaitu staff dari bagian atau divisi akuntansi perusahaan, pengacara dan staf legal perusahaan yang sesuai dengan keahlian yang diperlukan.

Dalam keseluruhan kasus yang terjadi, tim audit harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan, menghindari penuduhan, pengecekan ulang kesaksian dan bertindak secara profesional setiap waktu.

2.7 Peranan Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan

Audit Internal sangat erat berkaitan dengan masalah pencegahan *fraud* di dalam perusahaan. Adanya Audit Internal dalam suatu perusahaan diyakini bermanfaat dalam membantu mencegah terjadinya *fraud*. Namun demikian, Audit Internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya *fraud*, meskipun Audit Internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan *fraud*.

W. Steve Albrecth (2003:96) menyatakan bahwa:

"Fraud is reduced and often prevented (1) by creating a culture of honesty, openness, and assistance and (2) by eliminating opportunities to commit fraud"

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *fraud* dapat dikurangi bahkan dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menghilangkan peluang untuk melakukan *fraud*, misalnya dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan *fraud* akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Audit Internal harus bisa memastikan apakah *fraud* tersebut memang ada atau tidak. Untuk memastikannya, Audit Internal akan melakukan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern yang dibuat manajemen dan aktivitas karyawan perusahaan berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen. Disamping itu, Audit Internal harus mempunyai alat pengendalian yang efektif sehingga setiap *fraud* dapat dicegah sedini mungkin.

Dengan demikian, jelas bahwa Audit Internal membantu manajemen dalam memberikan saran dan nasehatnya sehubungan dengan Sistem Pengendalian yang dibuat oleh manajemen. Bukan menindaknya tapi sekedar menilai dan mengevaluasinya, karena tindakan lebih lanjut sepenuhnya ada ditangan manajemen.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukannya, Arif dan Satyo (2000:42) menyatakan bahwa:

"Pengendalian Intern yang baik dan keberanian serta keinginan seluruh anggota organisasi atau perusahaan untuk melaporkan *fraud* kepada pihak berwenang merupakan kiat jitu mengatasi *fraud*"

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dengan Pengendalian Intern yang baik dan adanya suatu tindakan dari perusahaan melaporkan kasus terjadinya *fraud* kepada aparat hukum merupakan salah satu kegiatan untuk mencegah terjadinya *fraud* di dalam perusahaan.

Untuk itu, pihak perusahaan harus menegaskan dan menekankan untuk tidak melakukan kecurangan dalam bentuk dan cara apapun, serta mengambil tindakan yang benar dalam upaya pencegahan dan penindakan kecurangan yang terjadi, sehingga perusahaan tidak dirugikan.